

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita: BPK Jateng

Halaman 7

Empat Daerah Kategori WDP

■ Hasil Pemeriksaan BPK di Jateng

SEMARANG -Tahun 2018, berdasarkan keseluruhan pemeriksaan yang dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Jateng, terdapat 11.036 jumlah temuan pemeriksaan dengan 25.060 rekomendasi.

"Dari total rekomendasi yang ada, sudah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi sebanyak 21.084 (84,13%), sudah ditindaklanjuti namun belum sesuai rekomendasi atau belum ditindaklanjuti sama sekali sebanyak 3.966 (15,82%), dan tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 10 rekomendasi (0,03%)," papar Kepala Perwakilan (Kalan) BPK Jateng Hery Subowo, disela audiensi kunjungan kerja Komite IV DPD RI ke BPK Perwakilan Jateng, Semarang, Selasa (27/11).

Ditandaskan, saat ini penyelesaian TLRHP oleh pemerintah telah ditetapkan menggunakan mekanisme berbasis online dengan pemanfaatan Sistem Informasi Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi LHP BPK (SIPTLR-LHP BPK).

"Dengan sistem ini, pejabat Pemda dapat mengunggah langsung dokumen ataupun bukti TLRHP dari kantor Pemda, dan BPK memantau tindak lanjut tersebut dari kantor BPK. Sistem ini sangat membantu, untuk memenuhi kewajiban penyelesaian TLRHP yang berdasarkan aturan ditetapkan dalam waktu 60 hari setelah LHP diserahkan," katanya.

Dipaparkan, opini BPK atas laporan keuangan pemda-pemda di Jateng, mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada Tahun Anggaran 2015, dari 36 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Jateng, 21 LKPD memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan 15 LKPD mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). 2016, terdapat peningkatan di mana dari 36 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Jateng, 31 LKPD memperoleh opini WTP dan 5 LKPD mendapat opini WDP. Sedangkan pada TA 2017, dari 36 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Jateng, 32 LKPD memperoleh opini WTP dan 4 LKPD mendapat opini WDP.

"Sementara empat daerah yang masih mendapatkan opini WDP ini, sifatnya masih dalam perbaikan. Karena rekomendasi yang kita berikan kalau perbaikan ini perlu waktu. Rata-rata yang menjadi persoalan tentang pencatatan aset daerah," tandasnya.

Sementara, Ketua Komite IV Ajiep Padindang, kunjungan kerja ke BPK Perwakilan Provinsi Jateng dilakukan untuk mendapatkan informasi, tanggapan dan penjelasan tentang temuan-temuan BPK yang dimuat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2018, baik yang sudah maupun yang belum ditindaklanjuti oleh entitas diperiksa.

"Hasil penelaahan dan pembahasan yang dilakukan oleh DPD RI, akan bahan untuk membuat pertimbangan dalam pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara," katanya.

Turut hadir dalam kunjungan tersebut, anggota Komite IV DPD RI Bambang Sadono (Jateng), A Aziz Adyas (Lampung), Rugas Binti (Kalteng), Adrianus Garu (NTT), Dewi Sartika Hemeto (Gorontalo), dan Mervin Sadipun Komber (Papua Barat). ■ *rix—sn*